

IMPLEMENTASI DEMOKRATISASI PANCASILA MELALUI PENATARAN P-4 BAGI MAHASISWA BARU FPIPS IKIP SURABAYA ANGKATAN 1984-1988

DINA LUSDIANA TAMPUBOLON

Jurusan S1 Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: dinatampubolon77@gmail.com

Septina Alrianingrum

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penataran P-4 didasarkan kepada TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau *Ekaprasetya Pancakarsa*. Penataran P-4 diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Mahasiswa sebagai penerus bangsa wajib mengamalkan Pancasila. IKIP Surabaya sebagai perguruan tinggi berbasis LPTK bertanggung jawab melahirkan tenaga pendidik yang berjiwa Pancasila. Oleh sebab itu, IKIP Surabaya berkontribusi penuh dalam upaya pengamalan Pancasila melalui penataran P-4. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu (1) apa yang melatarbelakangi dilaksanakan penataran P-4 sebagai implementasi demokratisasi Pancasila bagi mahasiswa; dan (2) bagaimana proses implementasi demokratisasi Pancasila melalui penataran P-4 bagi mahasiswa baru FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1984-1988. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah yang terdiri atas 4 tahap, pertama tahap heuristik, kedua verifikasi, ketiga interpretasi, dan keempat tahap historiografi.

Hasil penelitian ini penataran P-4 bagi mahasiswa dilatar belakangi oleh (1) sebagai penyempurnaan kebijakan NKK dan BKK di perguruan tinggi; (2) sebagai upaya penyamaan persepsi mengenai Pancasila dan UUD 1945; dan (3) sebagai kewajiban mengamalkan Pancasila bagi seluruh warga negara Indonesia. Pelaksanaan penataran P-4 di IKIP Surabaya dimulai tahun 1984, bersamaan dengan kegiatan OPSPEK. Proses demokratisasi Pancasila diimplementasikan melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan penugasan dengan materi butir-butir P-4 sebagai penekanan, memberikan pembiasaan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan butir-butir P-4 yang mencerminkan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokratisasi Pancasila berhasil dalam ranah kognitif, namun kurang disertai dengan sikap dan tindakan. Hal tersebut disebabkan kebebasan mahasiswa yang dibatasi serta peran penatar yang tidak memberikan tauladan bagi peserta. Selain itu improvisasi materi dan penyegaran metode dibutuhkan untuk mengatasi kejenuhan mahasiswa.

Kata kunci: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Demokratisasi, IKIP Surabaya.

Abstract

Pancasila has an important position for Indonesia. The New Order issued MPR Decree No. II/MPR/1978 on the Guidance of Practice and the Application of Pancasila (P-4) or *Ekaprasetya Pancakarsa*. Upgrading of P-4 is given to all levels of society as an effort to practice Pancasila and the 1945 Constitution in a pure and consequent manner. Upgrading of P-4 is given to the students as a learned generation who has the responsibility of being the heir and successor of the nation. IKIP Surabaya as a LPTK-based college is responsible for giving birth to a Pancasila-spirited educator. Therefore, IKIP Surabaya contributes fully in the effort of practicing Pancasila through the upgrading of P-4. The problems studied in this research are (1) what is behind the implementation of P-4 upgrading as implementation of Pancasila democratization for students; and

(2) how the process of implementation of Pancasila democratization through upgrading of P-4 for new student of FPIPS IKIP Surabaya force 1984-1988. The method used in this research is historical research method consisting of 4 stages, first stage heuristik, second verification, third interpretation, and fourth stage historiografi.

The results of this study upgrading P-4 for students background by (1) as a refinement of NKK policy and BKK of the college; (2) as an effort to equal perception of Pancasila and the 1945 Constitution; and (3) as an obligation to practice Pancasila for all Indonesian citizens. The implementation of P-4 upgrading at IKIP Surabaya began in 1984, together with OPSPEK activities. The process of democratization of Pancasila is implemented through lecture, discussion, and assignment activities with P-4 items as emphasis, giving students the habit to implement P-4 items reflecting the characteristics of Pancasila democracy. Democratization of Pancasila succeeds in the cognitive domain, but is lacking with attitudes and actions. This is due to the limited freedom of students and the role of penatar that does not provide a role model for the participants. In addition, material improvisation and refreshment methods are needed to overcome student saturation.

Keywords: Guidance of Practice and Applying of Pancasila (P-4), Democratization, IKIP Surabaya.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan prinsip atau azas dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.¹ Pancasila digunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk membangun tekad mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila memenuhi syarat sebagai pemersatu bangsa karena mampu mengakomodasi kemajemukan bangsa dan kondisi negara, sehingga dapat digunakan sebagai landasan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan berbangsa dan bernegara.² Oleh sebab itu, Pancasila penting untuk dihayati dan diamalkan demi mengikat kemajemukan bangsa.

Pada hakikatnya Pancasila mengandung dua pengertian pokok, sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Dari kedua pengertian tersebut kemudian lahir beberapa pengertian lainnya.³ Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dari waktu ke waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai dasar negara RI sebab Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴

Sejak Pancasila disahkan secara konstitusional sebagai dasar negara, Pancasila harus diyakini dan diterapkan oleh para penyelenggara negara dan seluruh

warga negara dalam kehidupan nyata sebab Pancasila berisi kebenaran yang tidak boleh disangsikan. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945.⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut maka Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis-hirarkhis. Dalam rangka memahami hakikat Pancasila, tidak dapat dilakukan secara terpisah antara sila satu dengan lainnya sebab setiap silanya mengandung korelasi yang kuat. Pancasila menempati pengertian sebagai satu kesatuan dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang lain dan keliru terhadap Pancasila. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya aktualisasi dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila dalam pola pembelajaran secara berkesinambungan.

Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan oleh beberapa kelompok sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Beberapa penafsiran tersebut menyebabkan perpecahan yang mampu merongrong persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Paham Nasakom yang dicetuskan oleh Soekarno juga menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa kritik tersebut menganggap bahwa paham Nasakom berusaha menggeser kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional yang mampu mempersatukan bangsa dan negara Indonesia.

Soeharto sebagai presiden masa Orde Baru lahir dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Demi mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 dalam

¹Abdul Rouf Tayip dan Warsono, 1996, *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Suatu Tinjauan Singkat*, Surabaya: University Press IKIP Surabaya, hlm. 9

²Piyoto, dkk, 2012, *Pancasila Dasar Negara*, Yogyakarta: PSP Press, hlm. 21.

³Subandi Al Marsudi, 2001, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁴*Ibid.*, hlm. 7.

⁵Tim MKU, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Surabaya: UNESA University Press, hlm. 9.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka Soeharto mengajak segenap bangsa Indonesia untuk memahami secara mendalam gagasan dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Soeharto menekankan bahwa tujuan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah mewujudkan masyarakat Pancasila dalam pembangunan di segala bidang.

Menurut Soeharto, Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan.⁶ Masyarakat yang berpegang teguh pada Pancasila maka kemerdekaan, persatuan, dan kesatuan bangsa mampu dipertahankan baik dalam menghadapi bahaya dari luar maupun pemberontakan dan pengkhianatan dari dalam. Kedudukan Pancasila yang fundamental maka memerlukan penjernihan terhadap cara pemahaman ataupun penafsiran yang dilakukan pada Pancasila.⁷

Ajakan Soeharto dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila menghasilkan suatu pedoman yang disampaikan pada pembukaan Musyawarah Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Kwartir Daerah Se-Indonesia pada tanggal 12 April 1976.⁸ Pada pidatonya beliau mengungkapkan gagasannya tentang semakin pentingnya menyusun pedoman dan penuntun yang praktis untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Soeharto menamakan pedoman dan penuntun yang praktis tersebut dengan *Ekaprasetya Pancakarsa*.

Pada Sidang Paripurna MPR tanggal 23 Maret 1978 dikeluarkannya TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) sebagai tindak lanjut usulan Presiden Soeharto tentang *Ekaprasetya Pancakarsa*. Ketetapan tersebut berisi rumusan yang sederhana dan jelas yang mencerminkan suara hati masyarakat Indonesia yang berjiwa Pancasila agar pedoman tersebut dapat dengan mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan.

Pelaksanaan penataran P-4 selain diberikan secara non-formal kepada seluruh lapisan masyarakat, juga dilakukan secara formal di kalangan perguruan tinggi. Pelaksanaan penataran di perguruan tinggi didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala BP-7 Pusat No. Kep-01/BP7/I/1984. Pola pelaksanaan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 86/Dikti/Kep/1983 yaitu pola pendukung 100 jam.⁹

IKIP Surabaya sebagai salah-satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mengemban tugas menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas wajib melaksanakan Keputusan Kepala BP-7 tentang pelaksanaan penataran P-4 di kalangan perguruan tinggi. Penataran P-4 di kalangan perguruan tinggi bertujuan mengantar mahasiswa baru

menjadi masyarakat ilmiah yang bermoral Pancasila, juga sebagai upaya mendemokratisikan mahasiswa agar mampu hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan kepada demokrasi Pancasila.

Penataran P-4 merupakan program pemerintah dalam meluaskan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar negara dan haluan negara agar masyarakat mampu memahami dan menghayatinya dengan mudah. Penataran P-4 memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas hidup yang demokratis sesuai dengan jiwa Pancasila. Kegiatan-kegiatan dalam penataran P-4 membiasakan mahasiswa mampu mengemban hak demokrasi dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.

Proses demokratisasi Pancasila melalui penataran P-4 belum pernah ditulis sebelumnya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis berusaha menggali mengenai pelaksanaan penataran P-4 bagi mahasiswa sebagai implementasi demokratisasi Pancasila bagi mahasiswa baru di FPIPS IKIP Surabaya. Penulis menyusun penelitian ini dengan judul "*Implementasi Demokratisasi Pancasila Melalui Penataran P-4 Bagi Mahasiswa Baru FPIPS IKIP Surabaya Angkatan 1984-1988*".

METODE

Penelitian ini berpedoman pada metode penelitian sejarah yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu (1) Heuristik; (2) Verifikasi; (3) Interpretasi; dan (4) Historiografi.¹⁰ Tahap pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini, penulis telah mengumpulkan sumber-sumber yang sesuai dan relevan dengan pelaksanaan penataran P-4 di IKIP Surabaya. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan arsip, surat kabar, dan wawancara.

Pencarian pertama berupa sumber primer dilakukan di Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Timur, Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya, dan Badan Kearsipan Universitas Negeri Surabaya Namun penulis tidak menemukan Surat Keputusan yang dikeluarkan Dirjen Dikti No. 86/DIKTI/Kep/1983 tentang pelaksanaan penataran P-4 pola pendukung 100 jam di Perguruan Tinggi. Selain SK Dirjen Dikti, SK dari BP-7 Pusat No. Kep. 01/BP-7/I/1984 tentang pelaksanaan penataran P-4 di kalangan Perguruan Tinggi Negeri juga tidak ditemukan sehingga penulis harus mencarinya melalui penelitian-penelitian terdahulu yang membahasnya.

Pencarian sumber selanjutnya di Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Dari pencarian tersebut diperoleh buku pedoman tahun 1986/1987 tentang Anggaran dasar IKIP Surabaya seperti visi, misi, dan tujuan IKIP Surabaya tahun kepemimpinan Budi Darma. Ditemukan dokumen mengenai jumlah mahasiswa angkatan 1985-1987 di Laporan Tahunan IKIP Surabaya 1985/1986-1987/1988. Penulis tidak

⁶CSIS, 1976, *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, hlm. 10.

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁸*Ibid.*

⁹ Anonim, 1990, *Karakteristik Proses Belajar-mengajar Penataran P-4 Bagi Mahasiswa Baru Sebagai Wujud Dari Pendidikan Pancasila*, UPI, hlm. 118. (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Pendidikan Indonesia).

¹⁰ Aminuddin Kasdi, 2005, *Memahami Sejarah*, Surabaya: Unesa University Press, hlm. 10

menemukan jumlah mahasiswa secara lengkap selama masa kepemimpinan Rektor Budi Darma, hanya 3 angkatan yang dapat ditemukan.

Pencarian selanjutnya adalah sumber primer berupa surat kabar yang dilakukan di Perpustakaan Medayu Agung Medokan Ayu Rungkut Surabaya dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Komunikasi Massa Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA AWS).

Selanjutnya untuk melakukan wawancara kepada mahasiswa IKIP Surabaya, penulis mengajukan surat ijin penelitian di BAAKPK Universitas Negeri Surabaya tentang data ketenaga-kerjaan yang mana dapat diketahui nama-nama dosen yang merupakan alumni mahasiswa FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1984-1988. Berdasarkan sumber tersebut, penulis dapat mengambil sampel untuk diwawancarai mengenai pelaksanaan penataran P-4 dan implementasi demokratisasi Pancasila. Narasumber terdiri atas rektor Budi Darma, dosen, guru, maupun yang berprofesi non-kependidikan.

Tahap kedua adalah menyeleksi, menilai, memilah-milah, dan menguji sumber-sumber yang telah diperoleh, yaitu kesesuaiannya dengan keperluan, mengandung data atau informasi pokok yang diperlukan dalam penyusunan sejarah.¹¹ Tahap ketiga interpretasi, pada tahap ini dilakukan melalui penggabungan sumber, dianalisis satu sama lain sehingga fakta sejarah mengenai pelaksanaan Penataran P-4 sebagai implementasi demokratisasi Pancasila di perguruan tinggi dapat dikonstruksi menjadi sebuah tulisan sejarah. Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Penataran P-4 Bagi Mahasiswa

Sejak KAMI dibubarkan tahun 1966, di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan Yogyakarta muncul kelompok-kelompok diskusi yang sifatnya intra-kampus. Sedangkan yang bersifat ekstra-kampus dari organisasi mahasiswa luar kampus, seperti PMII, HMI, PMKRI, dan sebagainya pun melahirkan kelompok (diskusi) Cipayung.¹² Meskipun KAMI dibubarkan, mahasiswa tetap berusaha menjalankan perannya sebagai pengontrol kehidupan sosial politik di era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Pada masa Orde Baru, beberapa kebijakan dikeluarkan sebagai upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam segala bidang yaitu ideologi, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang paling gencar dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk mencapai kestabilan hidup. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui program pembangunan jangka

panjang yang diberinama Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Namun pada awal tahun 1970-an, mahasiswa menggugat cara pembangunan nasional yang berlandaskan bantuan asing berupa penanaman modal asing. Sepanjang November-Desember 1973, berlangsung sederetan demonstrasi mahasiswa yang menyatakan Anti Modal Asing.¹³ Demonstrasi mahasiswa mencapai puncaknya pada 15 Januari 1974 dengan membakar fasilitas negara yang dianggap berafiliasi dengan modal asing. Peristiwa anarkis tersebut dikenal dengan Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) yang membawa dampak langsung bagi masyarakat sekitarnya.¹⁴

Setelah peristiwa Malari, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 028/U/1974 tanggal 3 Februari 1974 sebagai hasil rapat kilat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan rektor-rector Universitas se-Indonesia. Surat Keputusan tersebut berisi tentang penempatan aktivitas kampus di bawah pengendalian pimpinan perguruan tinggi, dan merupakan langkah pertama yang dilakukan institusi pendidikan untuk menghapuskan masuknya kepentingan politik di kampus.¹⁵

Pemerintah Orde Baru mengambil beberapa tindakan yang bertujuan untuk menata kembali kehidupan kampus sesuai dengan Tri Dharma yang telah dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. Pertama, berdasarkan pada SK Pangkopkamtip Laksamana Soedomo No. SKEP-02/KOPKAM/I/1978 mengenai pembekuan kegiatan Dewan Mahasiswa (Dema) universitas/perguruan tinggi/institut.¹⁶ Kedua, dilaksanakan program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Jusuf dengan dikeluarkannya SK No. 0156/U/1978.¹⁷ SK tersebut diberlakukan mulai tanggal 19 April 1978.

Konsep NKK ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi Trisna Amidjaya No. 002/DJ/Inst/1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan kembali lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi yang diakhiri dengan pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), badan tersebut bertugas mengawasi jalannya kegiatan mahasiswa selama di kampus.

Kebijakan NKK dan BKK ini disertai dengan dimulainya sistem Satuan Kredit Semester (SKS), diharapkan perhatian mahasiswa kepada masalah akademis diharapkan lebih meningkat. Kebijakan tersebut dapat dikatakan sesuai dengan tujuan sebab mahasiswa menjadi steril dengan persoalan-persoalan di luar akademik. Dengan SKS mahasiswa dituntut

¹¹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹² Abdul Syukur dkk, 2011, *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 91.

¹³ Taufik Abdullah, dkk, 2011, *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Pascarevolusi*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 356.

¹⁴ Abdul Syukur dkk, *op. cit.*, hlm. 359.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 361.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nani Mulyani dkk, 1995, *50 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Menteri Penerangan, hlm. 68.

untuk secepatnya menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan nilai yang maksimal.¹⁸

Sejak sistem SKS diberlakukan di perguruan tinggi tahun 1979, kurikulum di perguruan tinggi juga ikut disesuaikan. Kurikulum yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan dan kebutuhan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perlu mengikuti perkembangan sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sejak dikeluarkannya TAP MPR No. II/MPR/1973 tujuan umum pendidikan nasional diubah untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila. Kurikulum 1975 didasarkan atas tujuan pendidikan yang jelas.¹⁹ Selanjutnya setelah dikeluarkan TAP MPR No. II/MPR/1984, kurikulum 1984 dikembangkan dengan tujuan penyempurnaan kurikulum 1975 yang dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan jaman.

Kurikulum 1984 melahirkan dimensi-dimensi baru dalam pembangunan dan juga dalam pendidikan nasional, yaitu mengungkap proses *skill approach* dengan menggunakan model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan keterampilan proses. Proses belajar mengajar dengan model ini dimulai dengan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan.²⁰ CBSA merupakan salah-satu strategi partisipasi siswa sebagai subjek didik secara optimal sehingga siswa mampu mengubah dirinya (tingkah laku, cara berpikir, dan bersikap) secara lebih efektif dan efisien.²¹

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, memiliki tanggung jawab melestarikan dan mengamankan Pancasila. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kemauan yang kuat untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri negara Indonesia.

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh generasi muda dan kepribadian masyarakatnya dalam membangun bangsanya. Dalam sejarah bangsa Indonesia, masyarakat belum sepenuhnya mampu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Oleh sebab itu, pemerintah Orde Baru perlu memikirkan suatu strategi dan kerangka dasar dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan regenerasi generasi muda yang memiliki jiwa kebangsaan dan persatuan.

Dalam rangka regenerasi, generasi muda memiliki dua status. Pertama sebagai penerus cita-cita

perjuangan bangsa, dan kedua sebagai sumber insani pembangunan.²² Generasi pendahulu bertanggung jawab atas generasi muda yang bertugas sebagai penerus pemerintahan. Oleh sebab itu, generasi pendahulu memiliki kewajiban untuk mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda sehingga jati diri bangsa Indonesia tidak mudah goyah. Kewajiban tersebut mendorong munculnya upaya pelestarian dan pengamanan Pancasila melalui penataran P-4 yang dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.²³

Mahasiswa sebagai pewaris dan penerus masa depan negara, perlu memahami cita-cita dan tujuan nasional Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Mahasiswa diwajibkan mampu mengemban tugas sebagai pewaris pemerintahan dengan bekal pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu memahami dasar hukum dan arah haluan negara yang terkandung dalam UUD 1945 dan GBHN merupakan pendukung dalam menjadi insan yang lebih baik untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Penataran P-4 diberikan kepada mahasiswa sebagai upaya penyempurnaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Daed Yoesoef dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Hakekat NKK adalah meredenifisi dari lembaga-lembaga kemahasiswaan secara mendasar, fungsional dan bertahap. Kebijakan tersebut membawa manusia kepada kepribadian yang hakiki, yaitu sebagai pemikir dan menganalisa sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi.

Menurut Ruslan Abdulgani selaku Ketua Tim Panitia Penasehat presiden mengenai P-4, memberikan ceramahnya yang berjudul "Peningkatan mahasiswa dalam kaitannya dengan kegiatan generasi muda" dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan menyongsong Hari Pahlawan 10 November. Ruslan Abdulgani mengatakan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda perlu menyadari peranan kepemudaannya sesuai yang tertulis dalam GBHN.

Ruslan Abdulgani menyerukan agar pemuda memiliki idealisme sehingga mampu memelopori pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Mahasiswa didorong untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dengan terus mengembangkan pemikirannya dan mengabdikan kepada masyarakat. Pemerintah memerlukan pelopor dari generasi muda berupa idealisme, dedikasi, dan ilmu perjuangan. Ruslan Abdulgani mengharapkan para mahasiswa menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan baik sehingga hasilnya dapat disalurkan kepada masyarakat.²⁴

¹⁸ Surabaya Post, Selasa 3 April 1984, *Mahasiswa Sekarang Steril*.

¹⁹ Ria Winda Safitri, 2016, *Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968-1998*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, hlm. 34. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

²⁰ Agus Suprijono dkk, 2015, *Sejarah Pendidikan Nasional*, Surabaya: University UNESA Press, hlm. 233

²¹ *Ibid*, hlm. 42.

²² Surabaya Post, Kamis 2 Mei 1985, *PMP dan PSPB Akan Diajarkan Mulai dari Taman Kanak-kanak*, Tahun XXXIII No. 101.

²³ BP-7, *op. cit.*, hlm. 33.

²⁴ Surabaya Post, Sabtu 31 Oktober 1981, *Ruslan Abdulgani: Pelajari Sejarah*, Tahun XXIX No. 255.

Alasan mahasiswa diberikan penataran P-4 adalah selain degradasi moral yang terjadi sejak awal tahun 1970-an, P-4 juga merupakan sarana pendidikan politik tentang ideologi negara dan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mahasiswa paham atas apa yang dimaksud dan yang hendak dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pandangan tentang pembangunan nasional yang diterapkan oleh presiden Soeharto pada masa pemerintahannya.

P-4 merupakan kerangka dasar yang digunakan para generasi pendahulu untuk mewariskan nilai-nilai luhur negara Indonesia demi kesiapan generasi muda sebagai penerus bangsa dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menuju negara yang sejahtera dan damai. Pelaksanaan penataran P-4 bagi mahasiswa ditekankan pada tanggung jawab generasi muda untuk meneruskan perjuangan para pendahulu. Sebagai penerus bangsa, generasi muda patut memiliki jiwa yang nasionalis dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kecakapan seseorang untuk menyelami, menghubungi, mempengaruhi, meyakinkan, serta mengajak para anggota masyarakat agar melalui dinamika sosialnya mau menghayati dan mengamalkan Pancasila demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Keputusan Presiden No 10 Tahun 1979 pasal 2 BP-7 bertugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan P-4 di kalangan mahasiswa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden. Sebagai tindak lanjut dari keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Perguruan Tinggi, Penataran P-4 di kalangan Perguruan Tinggi Negeri dikoordinasikan oleh BP-7. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BP-7 Pusat No. Kep 01/BP-7/I/1984 tentang pelaksanaan Penataran di kalangan Perguruan Tinggi Negeri.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 86/Dikti/Kep/1983 tentang pelaksanaan penataran P-4 pola dukung 100 jam, penataran P-4 bagi mahasiswa mulai diterapkan. Penataran P-4 bagi mahasiswa baru termasuk pola pendukung yang diselenggarakan dengan jumlah waktu yang lebih banyak, yaitu 100 jam. Oleh sebab itu, pola ini disebut sebagai pola pendukung 100 jam.²⁵

Menurut pemberitaan yang dimuat oleh surat kabar Memorandum, perguruan tinggi merupakan wadah persiapan kelahiran intelegensi Indonesia yang wajib menjadi titik tumbuh pusat kegiatan lahirnya gagasan yang mantap untuk melestarikan Pancasila. Dalam kehidupan perguruan tinggi, P-4 seharusnya tidak hanya sekedar menjadi bahan kuliah, tetapi sebagai pedoman yang melengkapi pedoman-pedoman pengembangan perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Darma yang telah ada.²⁶

Tujuan khusus dari penataran P-4 bagi mahasiswa baru adalah (1) meningkatkan, memperluas, dan memperdalam pemahaman dan wawasan pemikiran mahasiswa; (2) memahami dan mampu melaksanakan sistem pendidikan tinggi sehingga memiliki kemampuan akademik dan tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) meningkatkan dan mengembangkan prestasinya untuk berperan serta dalam pembangunan; dan (4) mencapai sasaran prasyarat perkuliahan Pendidikan Pancasila.²⁷

Berdasarkan pola dan pendekatan yang telah disusun, dapat dilaksanakan dengan baik penataran P-4 bagi mahasiswa. Selain itu penciptaan suasana yang stabil oleh pemerintah dengan pemberlakuan sistem SKS yang diberikan kepada mahasiswa untuk kemajuan pendidikan di perguruan tinggi mendukung pelaksanaan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila di dunia kampus, sehingga tujuan dari pelaksanaan penataran P-4 bagi mahasiswa dapat dicapai.

B. Hubungan Demokrasi Pancasila dengan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)

Setiap upaya pembangunan yang berlangsung di Indonesia memerlukan keikutsertaan warga negara dalam menyumbangkan tenaga dan pemikirannya. Orde Baru merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto di mana Pancasila digunakan sebagai moral pembangunan.²⁸ Perwujudan cinta tanah air, bangsa, dan negara tentu harus seputar pembangunan. Pancasila sebagai moral perjuangan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional perlu diresapi agar menjadi sumber inspirasi perjuangan, penggerak dan pendorong pembangunan, pengarah dan sumber cita-cita pembangunan, sumber ketahanan nasional, dan pembimbing moral pada tingkatan operasional sampai ke unit terkecil pun dalam pembangunan nasional.²⁹ Oleh sebab itu, pelestarian dan pengamalan Pancasila perlu mendapatkan perhatian yang lebih maka diberlakukannya penataran P-4 bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perkembangan demokrasi, ketaatan kepada hukum harus dipupuk. Negara Indonesia membutuhkan perkembangan dan perubahan pada masyarakatnya terutama di bidang politik, baik berupa pengetahuan, perilaku, maupun tindakan. Perbedaan pendapat merupakan permasalahan yang wajar, sehingga diperlukan suatu penyelesaian yang dianggap baik melalui lembaga tertentu yang diatur oleh UUD 1945.³⁰ Dengan demikian kestabilan pemerintahan dan perkembangan masyarakat dapat berjalan dengan lancar, tanpa konflik yang membahayakan.

²⁷ BP-7, *op. cit.*, hlm. 12.

²⁸ BP-7, *op. cit.*, hlm. 59.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Darji Darmodihardjo dan Nyoman Dekker, 1975, *Uraian Singkat Tentang Pokok-pokok Demokrasi Pancasila*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, hlm. 59.

²⁵ Anonim, *op. cit.*, hlm. 35

²⁶ Memorandum, 5 Januari 1983, *Perguruan Tinggi Bukan Tempat Steril Dari Pemikiran P-4*.

Kestabilan politik antara masyarakat dengan pemerintah adalah dengan menyamakan persepsi tentang pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Oleh sebab itu, dalam rangka pembangunan moral bangsa dan penyamakan persepsi pemerintah Orde Baru mengeluarkan TAP MPR tentang P-4. Sebagai suatu negara yang demokratis, Indonesia memberikan tindakan secara hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam menyelesaikan permasalahan.

Adanya TAP MPR No. II/MPR/1978 bangsa Indonesia maju selangkah menuju terwujudnya bangsa yang menganut sistem Demokrasi Pancasila. Selain itu, penataran P-4 akan menjadi suatu tonggak atas perwujudan masyarakat yang demokratis sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Penataran P-4 juga memberikan pengalaman mendalam bagi masyarakat yang nantinya akan menjadi pondasi mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hubungan Demokrasi Pancasila dengan penataran P-4 adalah sejauh hubungan Pancasila dengan negara Indonesia. Maksudnya adalah bahwa tujuan utama penataran P-4 adalah menjadikan masyarakat Indonesia mampu hidup demokratis, sehingga dalam menghadapi permasalahan negara Indonesia mampu mengambil langkah sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut yaitu Demokrasi Pancasila. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa penataran P-4 menjadi sarana implementasi demokratisasi Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat yang telah mengikuti penataran. Oleh sebab itu, penataran P-4 bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia.

C. Pelaksanaan Penataran P-4 di FPIPS IKIP Surabaya tahun 1984-1988

Mahasiswa baru wajib mengikuti penataran P-4 sebelum memasuki bangku perkuliahan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman umum tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pemahaman tersebut digunakan untuk mengarahkan mahasiswa sebagai generasi muda untuk berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945. Menurut Aminuddin Kasdi, penataran P-4 penting bagi mahasiswa sebab penyampaiannya bukan hanya sebatas informasi, tetapi kegiatan diskusi yang mengantarkan mahasiswa untuk mampu mengemukakan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain. Kegiatan diskusi diatur secara bertingkat mulai dari diskusi kelompok, diskusi kelas, dan diskusi paripurna.³¹

Penataran P-4 di IKIP Surabaya diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan OPSPEK (Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus) sama halnya dengan perguruan tinggi pada umumnya. Pola yang digunakan sesuai dengan SK Dirjen Dikti yaitu pola pendukung 100 jam. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaannya berjalan secara terstruktur

mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, sejak hari senin hingga sabtu selama 2 minggu penuh, dan diselenggarakan di kampus Ketintang.³²

Pelaksanaan OPSPEK terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan dalam lingkup universitas, kegiatan diawali dengan upacara pembukaan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Usai upacara, peserta memasuki ruangan (Gedung Gelanggang Mahasiswa) untuk mendengarkan materi OPSPEK melalui ceramah dekanat oleh petinggi-petinggi kampus, yaitu Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan. Selain materi OPSPEK, sesi ini juga memberikan gambaran umum tentang penataran P-4 dan tujuannya diberikan kepada mahasiswa baru. Dalam sesi pertama ini, berlangsung selama 2 hari mulai pukul 06.00 sampai dengan 17.00 dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab interaktif.³³

Setelah materi OPSPEK disampaikan, sesi kedua adalah penataran P-4 yang merupakan bagian dari materi OPSPEK tentang wawasan kebangsaan. Materinya adalah Pancasila dan butir-butir P-4, dilengkapi dengan UUD 1945 dan GBHN untuk meningkatkan pendidikan politik bagi mahasiswa. Melalui ketiga materi tersebut diharapkan mempertinggi kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh warga negara turut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan nasional.

Penatar diisi oleh dosen yang telah mengikuti penataran P-4 minimal pola penatar 120 jam, selain itu juga dari dosen yang juga menjadi anggota BP-7.³⁴ Sesi kedua dilaksanakan dalam lingkup jurusan, mahasiswa diklasifikasikan sesuai dengan jurusannya masing-masing.³⁵ Hal ini dilakukan sebagai upaya pemahaman dan pemantapan atas wawasan kebangsaan sesuai dengan studi yang menjadi konsentrasinya.

Pelaksanaan penataran P-4 berlangsung selama dua minggu, materi diberikan secara bergilir. Berdasarkan piagam Sumarno yang diberikan sebagai bukti telah mengikuti penataran P-4 pola pendukung 100 jam tahun 1985/1986, pelaksanaannya berlangsung dari 27 Juli 1985 sampai dengan tanggal 14 Agustus 1985.³⁶ Berbeda dengan piagam Raden Roro Nanik Setyawati sebagai mahasiswa baru angkatan 1986 pelaksanaan penataran P-4 menunjukkan tanggal 18 Agustus sampai dengan 31 Agustus 1986.³⁷

³² *Ibid.*

³³ Hasil wawancara dengan Farhan Effendy, alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1985, pada Kamis 13 April 2017 pukul 19.30 WIB.

³⁴ Ketenagaan di IKIP Surabaya hampir semua telah mengikuti penataran P-4, Berdasarkan pidato tahunan pada Dies Natalis IKIP Surabaya ke-17, 19 Desember 1981.

³⁵ Hasil wawancara dengan Raden Roro Nanik Setyawati, alumni mahasiswa jurusan PMP-Kn FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1986 pada Senin 3 April 2017 pukul 13.00 WIB.

³⁶ Piagam No. 91910 milik Sumarno sebagai tanda kelulusan mengikuti penataran P-4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru tahun 1985/1986 IKIP Surabaya.

³⁷ Piagam No. 01763 milik RR. Nanik Setyawati sebagai tanda kelulusan mengikuti penataran P-4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru tahun 1986/1987 IKIP Surabaya.

³¹ Hasil wawancara dengan Aminuddin Kasdi, penatar di IKIP Surabaya pada Senin 27 Maret 2017 pukul 14.00 WIB.

Sesi kedua, kegiatannya berlangsung sejak hari ke-3 sampai dengan ke-14. Pada pagi hari kegiatan penataran diawali dengan apel pagi yang wajib diikuti oleh seluruh peserta penataran, selanjutnya peserta diminta memasuki kelas sesuai dengan jurusannya. Di dalam kelas, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk hasil yang lebih intensif.³⁸ Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan pendalaman materi atau penugasan. Setiap tiga hari sekali dilakukan diskusi paripurna yang digunakan untuk mengevaluasi materi yang telah diterima peserta.

Materi yang dikembangkan terdiri atas Pancasila dan butir-butir P-4, kemudian UUD 1945, dan GBHN. Materi disajikan secara bergilir dengan alokasi waktu 32 jam setiap materi ditambah diskusi paripurna 4 jam untuk mengulas keseluruhan materi. Berdasarkan ketiga materi yang dikembangkan dalam kegiatan penataran P-4, materi yang menekankan hasil implementasi demokratisasi Pancasila adalah butir-butir P-4 yang terdiri atas 36 butir. P-4 merupakan materi yang memiliki pengaruh yang kuat dalam mengimplementasi demokratisasi Pancasila di Indonesia. Materi P-4 butir-butirnya menggambarkan sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap butir-butir P-4 menggambarkan warga negara yang ber-Pancasilais. Materi P-4 memiliki pengaruh kuat mengimplementasi demokratisasi Pancasila sebab mengantarkan mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki peran penuh dalam perjuangan pro-demokrasi Pancasila, khususnya pada sila ke-4. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila terpancar dalam setiap butir-butir P-4, sehingga dapat dikatakan bahwa materi P-4 merupakan materi yang digunakan untuk mendemokraskan mahasiswa sehingga mampu menghasilkan sikap dan perilaku yang demokratis.

Demi memantapkan pemahaman dan penghayatan tentang butir-butir P-4, UUD 1945, dan GBHN, mahasiswa diminta untuk memenuhi tugas akhir sebagai tagihan akhir berupa penyusunan makalah atas pengalamannya mengikuti penataran P-4 dan dihubungkan dengan materi yang telah diterimanya selama dua minggu ini.³⁹

Media yang digunakan adalah buku paket sebagai rujukan utama dalam memahami materi penataran P-4 yang setiap peserta wajib memilikinya. Selain itu adalah makalah yang digunakan untuk membantu peserta memantapkan pemahaman dalam kegiatan diskusi, dan daftar pertanyaan yang digunakan untuk kegiatan pendalaman materi. Petugas yang menjadi penatar adalah dosen lokal yang notabennya adalah dosen Mata Kuliah dasar Umum (MKDU) Pancasila dan telah mengikuti penataran P-4 minimal pola penatar 120 jam. Pelaksanaan kegiatan ini

dipertanggung-jawabkan oleh panitia penyelenggara yang merupakan aktivis kampus.

Pada awal pelaksanaannya tahun 1984, buku pedoman penataran bagi peserta yang berisi materi penataran terpisah sehingga mahasiswa angkatan 1984 mendapatkan buku berjumlah 3 buah dengan buku I butir-butir P-4, buku II UUD 1945, dan buku III GBHN.⁴⁰ Selanjutnya pada tahun 1985 yaitu angkatan 1985 dan seterusnya buku pedoman penatarannya dipadukan menjadi satu kesatuan, sehingga mahasiswa angkatan tersebut hanya mendapatkan satu buku dengan ukuran kecil namun tebal sebab berisi tiga materi pokok penataran.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan penataran P-4 lebih menekankan kepada transformasi pengetahuan dari penatar ke peserta penataran. Akan tetapi selain transformasi pengetahuan yang dilakukan melalui metode ceramah, namun juga menggunakan metode diskusi dan penugasan. Metode tersebut bertujuan mengaktifkan proses berpikir mahasiswa yang lebih tinggi. Setelah mengikuti penataran, peserta diharapkan mampu menampakkan pengaruhnya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Contoh ranah psikomotor sebagai hasil dari mengikuti penataran P-4 adalah yang telah oleh Raden Roro Nanik Setyawati⁴². Nanik sebagai mahasiswa baru yang telah mengikuti penataran P-4 memiliki potensi yang baik dalam menulis. Beliau mengirimkan artikelnya ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka (UT) dengan judul *Mekanisme Kepemimpinan Nasional 5 Tahunan Sesuai Dengan UUD 1945 Menjamin Stabilitas Politik, Pemerintahan, Kontinuitas Kebijakan, Penampungan Dinamika Masyarakat*⁴³. Artikel tersebut memberikan peluang Nanik untuk membuktikan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁴

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Nanik, dapat diartikan tindakan tersebut sebagai hasil dari implementasi demokratisasi Pancasila bagi mahasiswa melalui penataran P-4. Beliau mengungkapkan bahwa artikel yang dikirimkannya adalah tugas laporan diskusi. Artikel tersebut merupakan hasil diskusi dengan temannya ketika kegiatan diskusi, beliau bukan hanya menuliskan pemikirannya namun juga beberapa pemikiran temannya sebagai bukti penghargaan atas pendapat yang dikeluarkan oleh temannya.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Artono, alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1984 pada Senin 27 Maret 2017 pukul 13.00 WIB.

⁴¹ Hasil wawancara kepada Sumarno selaku mahasiswa FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1985, 29 Maret 2017.

⁴² Alumni mahasiswa jurusan PMP-Kn FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1986.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, *Mekanisme Kepemimpinan Nasional 5 Tahunan Sesuai Dengan UUD 1945 Menjamin Stabilitas Politik, Pemerintahan, Kontinuitas Kebijakan, Penampungan Dinamika Masyarakat*, Rr. Nanik Setyawati pada 17 Oktober 1985 (Surat Keterangan terlampir).

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Raden Roro Nanik Setyawati, alumni mahasiswa jurusan PMP-Kn FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1986, pada Senin 3 April 2017 pukul 11.00 WIB

³⁸ Hasil wawancara dengan Raden Roro Nanik Setyawati, alumni mahasiswa jurusan PMP-Kn FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1986, pada Senin 3 April 2017 pukul 11.00 WIB.

³⁹ Hasil wawancara dengan Lilik Soebarijati, alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 1985. Pada Jumat 7 April 2017 pukul 08.00 WIB.

Bagi Nanik kegiatan diskusi merupakan momentum yang strategis dalam mengantarkan mahasiswa kepada kehidupan yang lebih demokratis dengan cara mengimplementasikan butir-butir P-4. Menurutnya, diskusi menghasilkan berbagai pengalaman yang sebelumnya belum diterimanya ketika mengikuti penataran P-4 di SMP dan SMA. Nanik menganggap bahwa mahasiswa sebagai pelopor terlaksananya kehidupan yang lebih demokratis. Oleh sebab itu kegiatan patut dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.⁴⁵

Bagi Nanik penataran P-4 berhasil mendemokratisasi mahasiswa di aspek kognitif, afektif, dan psikomotor meskipun keberhasilannya dipengaruhi kesungguhan individu mahasiswanya sebagai faktor utama. Hal ini senada dengan pendapat Agus Trilaksana⁴⁶ bahwa keberhasilan demokratisasi Pancasila bagi mahasiswa IKIP Surabaya tergantung pada penerimaan peserta (mahasiswa). Namun Agus menyatakan bahwa seseorang yang berpengetahuan, setidaknya memiliki niatan perubahan pada diri peserta meskipun masih dalam tahap prinsipal yang dilakukan, misalnya jujur, menghargai pendapat, dan bekerjasama.⁴⁷

Susanti menyatakan bahwa penataran P-4 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan pendapatnya ketika berdiskusi, selain mengemukakan pendapat mahasiswa juga belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan bekerjasama.⁴⁸ Oleh sebab itu, penataran P-4 bagi Susanti dianggap berhasil memacu mahasiswa untuk berperan aktif dan menumbuhkan sikap saling menghargai atas hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang terdiri atas keberagaman budaya, ras, suku, dan agama.

Pada kegiatan diskusi, mahasiswa yang berbeda golongan, suku, dan ras bertemu dan terjalin dialog yang sehat sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahami satu sama lain sebab melalui kerangka berpikir P-4 yang telah menimbulkan perasaan saling pengertian yang lebih serasi. Melalui diskusi yang berisi komunikasi sosial seperti ini, meski berlangsung terbuka dan penuh kebebasan, kegiatan ini tidak menimbulkan gejala sosial.

Pada pelaksanaan penataran P-4, seluruh mahasiswa diwajibkan mengikutinya. Meskipun bukan melalui pemaksaan, namun penataran P-4 merupakan kewajiban yang mengharuskan seluruh mahasiswa untuk melaksanakan penataran. Hal ini diungkapkan oleh Agus Trilaksana, bahwa penataran P-4 merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Tidak ada alasan

yang memperbolehkan mahasiswa meninggalkan dan tidak mengikuti penataran P-4. Jika mahasiswa tidak mengikuti penataran selama hanya satu hari, mahasiswa diminta untuk mengulang di tahun berikutnya.⁴⁹

Penataran dilaksanakan dengan cara bebas dan terarah. Bebas yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat dalam diskusi-diskusi yang memang diadakan di setiap penataran. Terarah yaitu kegiatan diskusi tertuju pada pelaksanaan P-4, UUD 1945, dan GBHN. Dengan jalan ini, segala pikiran, perasaan, dan kritik dapat tersalurkan dengan baik. Melalui diskusi tersebut, akhirnya terdapat kesamaan pandangan mengenai berbagai masalah pokok yang dihadapi bersama.

Penataran P-4 bagi mahasiswa baru FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1984-1988 dalam pelaksanaannya berjalan secara terprogram dan terstruktur sesuai dengan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi. Sehingga tepat sasaran dan mudah dipahami oleh kalangan yang dimaksud. Selain itu pelaksanaan penataran mampu berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang telah ada di IKIP Surabaya sehingga menciptakan suasana nyaman dalam beraktivitas.

Pada pelaksanaan penataran P-4 tampak keteraturan dan ketenangan. Namun sebagian kalangan menganggap segala ketenangan yang tampak hanya di permukaan, sebagai bentuk kepatuhan kalangan pemuda dan ungkapan ketakutan atas kekuatan Rezim Orde Baru. Atas ketidaknyamanan para pemuda tersebut, maka dalam pelaksanaannya Pancasila dan butir-butirnya hanya sekedar dihapalkan namun tidak dipraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian atas pelaksanaan penataran P-4 bagi mahasiswa baru di FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1984-1988, pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil mensosialisasikan Pancasila melalui butir-butir P4, UUD 1945, dan GBHN dengan hasil berupa pemahaman menyeluruh meskipun pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari kurang maksimal. Sebagian besar mahasiswa yang menjadi narasumber penelitian ini menganggap bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang dituliskan dalam buku pedoman penataran P-4 bagi mahasiswa.

D. Implementasi Demokratisasi Pancasila Bagi Mahasiswa FPIPS IKIP Surabaya

Proses demokratisasi meliputi upaya memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk memahami mengenai kebijakan pemerintah dan hidup berdemokrasi. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui kegiatan penataran P-4. Penataran P-4 selain sebagai upaya pengamalan Pancasila juga untuk mensosialisasikan dasar hukum

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1987.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Agus Trilaksana, alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1987, pada Kamis 23 Maret 2017 pukul 13.00 WIB.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Susanti, alumni mahasiswa prodi Pendidikan Akutansi FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1988, pada Selasa 11 April 2017 pukul 12.00 WIB.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Agus Trilaksana, alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 1987, pada Kamis 23 Maret 2017 pukul 15.00 WIB.

bernegara dan arah haluan pembangunan negara sehingga terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional.

Pemahaman atas Demokrasi Pancasila harus diberikan oleh seluruh masyarakat, khususnya melalui bidang pendidikan di seluruh jenjang mulai Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Lembaga pendidikan berperan penting dalam menyebarkan pengertian dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila. IKIP Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi menunjukkan kontribusinya dalam menyebarkan Demokrasi Pancasila melalui penyelenggaraan penataran P-4 bagi mahasiswa baru.⁵⁰

Menurut Sumarno, tujuan utama penataran P-4 bagi mahasiswa adalah mensosialisasikan Pancasila dan Demokrasi Pancasila sehingga penataran P-4 dikatakan sebagai proses pendemokrasian generasi muda untuk mewarisi pemerintahan di Indonesia di masa mendatang.⁵¹ Pendapat Sumarno senada Raden Roro Nanik Setyowati⁵², Nanik menganggap pelaksanaan penataran P-4 mempengaruhi pengetahuan generasi muda untuk menjadi insan yang lebih bertanggung jawab dan demokratis.

Materi dalam penataran P-4 yang merupakan implementasi demokratisasi Pancasila adalah butir-butir P-4. Pada pelaksanaannya, demokratisasi Pancasila dapat dilakukan melalui ceramah (penjelasan) mengenai pentingnya pengimplementasian butir-butir P-4 dalam kehidupan sehari-hari sebab dalam setiap butirnya mencerminkan ciri-ciri Demokrasi Pancasila. Demokratisasi dilanjutkan melalui kegiatan diskusi yang meminta peserta mengimplementasikan sikap tersebut dalam kegiatan diskusi.

Misalnya ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah selalu berdasar kepada kekeluargaan dan gotong royong, tercermin dalam P-4 sila ke-4 butir ke-4 yaitu menyatakan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Dalam kegiatan diskusi, musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan sehingga peserta (mahasiswa) mampu memutuskan secara bersama atas masalah yang didiskusikan. Kegiatan tersebut menunjukkan peserta mampu mengimplementasikan upaya-upaya pemerintah Orde Baru dalam mendemokrasikan mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, momentum dalam penataran P-4 yang paling strategis dalam mengimplementasikan butir-butir P-4 adalah kegiatan diskusi. Melalui diskusi, peserta terbiasa musyawarah dalam mencapai kemufakatan, menghargai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak mengenal mayoritas dan minoritas,

menghargai HAM, berkedaulatan rakyat, dan mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

Berdasarkan hubungan antara Demokrasi Pancasila dengan butir-butir P-4 menunjukkan bahwa materi tersebut memang diberikan sebagai upaya menyamakan persepsi mahasiswa dalam proses pembangunan dan mendemokrasikan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Implementasi demokratisasi Pancasila merupakan hasil dari pengimplementasian butir-butir P-4 yang tercermin dalam ciri demokrasi Pancasila sebagai proses mendemokrasikan Pancasila melalui penataran P-4. Oleh sebab itu, untuk berhasil mendemokrasikan mahasiswa maka dibutuhkan kesungguhan dari mahasiswanya dalam mengikuti penataran.

Raden Roro Nanik Setyawati menganggap bahwa pelaksanaan penataran P-4 memang dilakukan pemerintah sebagai upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang permasalahan kemasyarakatan, kebijakan pemerintah, dan arah pembangunan nasional sehingga mampu bersikap lebih demokratis dari sebelumnya.⁵³ Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa hanya beberapa mahasiswa yang antusias dan memberikan respon yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Farhan Effendy bahwa penataran P-4 lebih menekankan kepada pemahaman di ranah kognitif. Sedangkan afektif dan psikomotor kurang pada pengimplementasiannya.

Oksiana menganggap bahwa penataran P-4 hanya sekedar sebagai sosialisasi Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Jika dikatakan sebagai proses demokratisasi Pancasila kepada mahasiswa, penataran P-4 kurang mengena dalam pengimplementasian sikap dan tindakan mahasiswa setelah mengikuti penataran P-4.⁵⁴ Penataran P-4 hanya memberikan bekas pada ingatan mahasiswa, namun tindakan mahasiswanya belum mencerminkan secara utuh pengamalan Pancasila.

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat belum dirasakan mahasiswa sepenuhnya. Sikap kritis mahasiswa terhadap materi yang dikembangkan terkadang menunjukkan pada protes mahasiswa. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh Agus Trilaksana bahwa pada tahun Beliau mengikuti penataran. Ketika berlangsung kegiatan penataran P-4 dengan materi UUD 1945 menggunakan metode ceramah, terdapat seorang temannya yang menanyakan secara kritis tentang pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan sebelumnya yaitu 23 April 1987. Menurutnya pemilu tersebut dirasa belum dilaksanakan sesuai dengan ciri demokrasi Pancasila. Sikap kritis beliau memunculkan sikap-sikap kritis teman-temannya sehingga menimbulkan ketidak stabilan pelaksanaan penataran pada masa itu. Sehingga teman Agus Trilaksana

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Budi Darma, mantan Rektor IKIP Surabaya periode 1984-1988, pada Kamis 13 April 2017 pukul 11.00 WIB.

⁵¹ Hasil wawancara kepada Sumarno, alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1985, pada Rabu 29 Maret 2017 pukul 13.00 WIB.

⁵² Raden Roro Nanik Setyawati selaku mahasiswa jurusan PMP-Kn FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1986, pada Senin 3 April 2017 pukul 11.00 WIB.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Oksiana Jatningsih, alumni mahasiswa jurusan PMP-Kn angkatan 1986, pada Senin 3 April 2017 pukul 13.00 WIB.

tersebut segera dipanggil untuk diberikan pemahaman khusus dengan dosen yang menjadi konsentrasinya.

Sikap kritis yang harusnya dimiliki oleh mahasiswa tidak dapat terlaksana di kegiatan penataran P-4. Hal ini yang menyebabkan melemahnya sikap kritis mahasiswa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Akan tetapi bagi mahasiswa IKIP Surabaya yang lebih aktif dalam kegiatan akademisi, menyebabkan sikap damai terhadap pelaksanaan penataran P-4. Penolakan mahasiswa tidak terjadi di IKIP Surabaya, sehingga pelaksanaan penataran P-4 di IKIP Surabaya berjalan secara damai meskipun terkadang terdengar celotehan mahasiswa dalam mengkritisi pelaksanaannya.

Selain kebebasan yang kurang dirasakan peserta, panutan atau tauladan dari para penatar belum mencerminkan sebagai manusia Pancasila. Hal tersebut yang menjadikan alasan mahasiswa enggan untuk mengimplementasikan butir-butir P-4 dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam konteks prinsipal, seperti kejujuran, disiplin, dan menghargai pendapat orang lain, penataran P-4 dapat dikatakan berhasil.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, sebagian besar narasumber menganggap bahwa penataran ini berhasil mendemokraskan mahasiswa IKIP Surabaya dalam ranah kognitif (ingatan). Tapi mahasiswa IKIP Surabaya dalam mengimplementasikan butir-butir P-4 cukup kecil sehingga belum memberikan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara optimal.

Hal yang patut dievaluasi dari pelaksanaan penataran P-4 adalah materi yang dirasa sudah diterima oleh mahasiswa di bangku sekolah menengah sehingga menyebabkan kebosanan. Metode yang digunakan terkesan sebagai upaya yang sifatnya dokmatis sehingga pengetahuan yang disampaikan hanya sebagai pengetahuan.

Adanya tagihan akhir berupa pembuatan makalah atau essay sesuai dengan tema yang dianggap penting, mahasiswa dipacu untuk meneliti segala permasalahan yang terjadi di Indonesia sehingga mampu menemukan cara yang layak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bukan dengan demo atau aksi-aksi yang bersifat radikal yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan kondisi politik. Ketika kestabilan tidak diperoleh maka pembangunan nasional tidak mampu dilaksanakan.

Meskipun penataran P-4 hanya mendemokraskan mahasiswa dalam aspek pengetahuan namun hal tersebut berguna pada perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewiraan. Hal tersebut dirasakan oleh mahasiswa FPIPS yang mengambil program studi PMP-Kn. Jika dilihat dari konsep, penataran berjalan terstruktur. Butir P-4 yang berjumlah 36 butir dihafalkan dan dipahami oleh seluruh mahasiswa. Butir-butir tersebut menjabarkan

nilai-nilai Pancasila yang secara komprehensif sehingga mampu mencakup segala aspek dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶ Namun kestrukturannya pelaksanaan penataran P-4 merupakan hasil dari kelayakan mahasiswa terhadap kebijakan Orde Baru, sehingga yang sampai ke hati adalah sekedar pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi demokratisasi Pancasila melalui penataran P-4 bagi mahasiswa di FPIPS IKIP Surabaya dapat dikatakan berhasil di bidang kognitif. Mahasiswa tidak lagi bertindak radikal dan menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia adalah bukti kelayakan mahasiswa. Kelayakan yang diciptakan pemerintahan kepada mahasiswa benar-benar berhasil. Bukan karena mahasiswa telah mampu mengimplementasikan demokrasi namun kepada hukuman yang akan diterima mahasiswa jika ketahuan. Meskipun hasil implementasinya adalah persamaan persepsi, namun ketika seseorang tersebut mendapatkan pengetahuan baru dan bersifat menyeluruh maka secara tidak langsung mereka akan bersikap layaknya yang mereka pelajari sebab pengetahuan tersebut telah melekat kuat dalam diri mahasiswa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penataran P-4 diberikan kepada mahasiswa dilatar belakangi oleh upaya penyempurnaan kebijakan NKK dan BKK yang diberlakukan di seluruh Perguruan Tinggi. Penataran dilaksanakan bagi mahasiswa juga sebagai upaya menyamakan persepsi mengenai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pengamalan Pancasila yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian penataran diberikan kepada mahasiswa sebagai upaya.

Demi terlaksana Demokrasi Pancasila, setiap warga negara wajib memahami batasan-batasan hak dan kewajibannya yang tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN sehingga tercipta tata kehidupan yang demokratis. Penataran P-4 sebagai jalan keluar untuk menuju pemahaman mendalam dan persamaan persepsi atas Pancasila untuk menumbuhkan kestabilan pemerintahan di Indonesia. Penataran P-4 menjadikan masyarakat Indonesia mampu memahami makna hidup demokratis, sehingga dalam perilaku kehidupan sehari-harinya mampu mencerminkan perilaku pengamalan Pancasila.

Pelaksanaan penataran P-4 bagi mahasiswa didasarkan kepada SK Dirjen Dikti No. 86/DIKTI/Kep/1983 tentang pelaksanaan penataran P-4 pola pendukung 100 jam di Perguruan Tinggi. Berdasarkan SK tersebut, penataran P-4 mulai diberikan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai upaya menghayati dan mengamalkan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Farhan Effendy, alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkata 1985, pada Kamis 13 April 2017 pukul 19.30 WIB.

⁵⁶ Muchlas Samani, Jumat 31 Juli 2015, *Belajar dari Kegagalan P-4*, diakses pada 11 April 2017, pada <http://muchlassamani.blogspot.com>.

Pancasila. Penataran P-4 bagi mahasiswa substansinya sebagai upaya mengembangkan pengertian demokrasi melalui kegiatan demokratisasi yang berdasarkan kepada Pancasila.

Penataran P-4 bagi mahasiswa baru di IKIP Surabaya mulai dilaksanakan secara bertahap tahun 1984. Penataran P-4 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh BP-7 yaitu menggunakan pola pendukung 100 jam. Penataran P-4 di FPIPS IKIP Surabaya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan OPSPEK yang dilaksanakan selama dua minggu penuh dengan tiga materi pokok yang saling berkaitan yaitu P-4, UUD 1945, dan GBHN. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua sesi, pertama dilaksanakan pada tingkat universitas selama 2 hari. Kedua dilaksanakan pada tingkat jurusan selama 12 hari. Diskusi terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu diskusi kelompok, kelas, dan paripurna.

Implementasi demokratisasi Pancasila melalui penataran P-4 dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang mendorong partisipasi peserta. Kegiatan dilakukan dengan membuat forum diskusi untuk menyalurkan kreatifitas dan mengapresiasi pendapatnya sebagai perwujudan demokratisasi Pancasila. Diskusi dilakukan untuk memberikan pembiasaan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan setiap butir P-4 dalam hidup bermasyarakat dan demokratis. Selanjutnya mahasiswa diminta melaporkan hasil diskusi dan menulis makalah tentang permasalahan yang sedang berkembang, kegiatan tersebut bertujuan mengantarkan mahasiswa terbiasa mengemban tugas dan menjalankan kewajiban bagi warga negara yang baik.

Implementasi demokratisasi Pancasila melalui pelaksanaan penataran P-4 berhasil dalam ranah kognitif. Demi hasilnya sampai kepada ranah psikomotor dibutuhkan penyegaran dalam pengemasan penataran P-4 yang mendorong antusias mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dalam penataran P-4. Improvisasi materi dan variasi dalam penggunaan metode patut dilakukan mengingat upaya penataran P-4 bukan hanya semata transformasi pengetahuan, tetapi sebagai proses belajar hidup berdemokrasi sesuai hakikat nilai-nilai Pancasila.

B. Saran

Pelaksanaan penataran P-4 di IKIP Surabaya memberikan hasil yang baik bagi mahasiswanya meskipun yang dihasilkan lebih kepada kemampuan kognisinya. Perlu dibentuk suatu badan yang menaungi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan demokratisasi Pancasila bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Lembaga tersebut diharapkan tidak sebagai alat pemerintah dalam menyamakan atau memaksakan mahasiswa memiliki persepsi yang sama, namun sebagai wadah mahasiswa untuk mampu mengembangkan kualitas hidupnya untuk lebih demokratis. Sebab mahasiswa patut diberikan kebebasan membangun idealismenya namun tetap

dalam koridor ketetapan-ketetapan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan demokratisasi yang dimaksudkan penulis bukan sebagai pengulangan kesalahan yang dilakukan pada Orde tertentu, namun sebagai program berkelanjutan yang memiliki sisi positif terhadap mengembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Pelaksanaan demokratisasi harus dengan upaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Perlu adanya suatu improvisasi materi sesuai dengan perkembangan yang kekinian serta disesuaikan dengan bidang yang menjadi konsentrasi mahasiswa. Selain itu pula dibutuhkan upaya penyegaran di setiap instrumentnya agar tidak terjadi kejenuhan pada mahasiswa sebagai progam pemerintah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Buku Pedoman Mahasiswa Tahun Akademik 1986/1987
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa
- Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Surat Keterangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka milik Raden Roro Nanik Setyowati sebagai tanda ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan Universitas Terbuka di Jakarta 17 Oktober 1986

Artikel

- Memorandum, Rabu 5 Januari 1983, *Perguruan Tinggi Bukan Tempat Steril Dari Pemikiran P-4*.
- Muchlas Samani, Jumat 31 Juli 2015, *Belajar dari Kegagalan P-4*, <http://muchlassamani.blogspot.com>.
- Surabaya Post, Kamis 2 Mei 1985, *PMP dan PSPB Akan Diajarkan Mulai dari Taman Kanak-kanak*, Tahun XXXIII No. 101.
- Surabaya Post, Selasa 3 April 1984, *Mahasiswa Sekarang Steril*. Surabaya Post, Sabtu 31 Oktober 1981 Tahun XXIX No. 255, *Roeslan Abdulgani: Pelajari Sejarah*.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan Budi Darma selaku mantan Rektor IKIP Surabaya Periode 1984-1988.
- Hasil wawancara dengan Aminuddin Kasdi selaku penatar di FPIPS IKIP Surabaya
- Hasil wawancara dengan Artono selaku alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1984
- Hasil wawancara dengan Sumarno selaku alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1985

- Hasil wawancara dengan Farhan Effendy selaku alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1985
- Hasil wawancara dengan Lilik Soebarijati selaku alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1985
- Hasil wawancara dengan Raden Roro Nanik Setyowati selaku alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1986
- Hasil wawancara dengan Oksiana Jatningsih selaku alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1986
- Hasil wawancara dengan Agus Trilaksana selaku alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1987
- Hasil wawancara dengan Susanti selaku alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1988

Buku

- Abdullah, Taufik dkk. 2011. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Pascarevolusi*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Al Marsudi, Subandi. 2001. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 1990. *Karakteristik Proses Belajar-mengajar Penataran P-4 Bagi Mahasiswa Baru Sebagai Wujud Dari Pendidikan Pancasila*. UPI. (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Pendidikan Indonesia)
- BP-7. 1994. *Bahan Penataran P-4*. Jakarta: BP-7 Pusat
- CSIS. 1976. *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Darmodihardjo, Dardji dan Nyoman Dekker. 1975. *Uraian Singkat Tentang Pokok-pokok Demokrasi Pancasila*. Malang: Universitas Brawijaya Malang
- Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press
- Mulyani, Nanik dkk. 1995. *50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Menteri Penerangan.
- Piyoto dkk. 2012. *Pancasila Dasar Negara*. Yogyakarta: PSP Press.
- Suprijono, Agus dkk. 2015. *Sejarah Pendidikan Nasional*. Surabaya: University UNESA Press.
- Syukur, Abdul dkk. 2011. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tayip, Abdul Rouf dan Warsono. 1996. *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Suatu Tinjauan Singkat*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya.
- Tim MKU. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Surabaya: UNESA University Press.
- Windi Safitri, Ria. 2016. *Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968-1998*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya).